

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta. 2014.
- Abdurrahman. H. *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta. 2015.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung. Jakarta. 2002.
- Anita Kamilah. *Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria. Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*. Media Keni. Bandung. 2013.
- Anwar Saleh. *Pokok Pikiran Mencari penyelesaian Permasalahan Hutan Tabah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau secara Adil Dan Beradab. Berdaya Guna Dan Berhasil Guna "Tanah Ulayat Dan Keberadaan Masyarakat Adat"*. LPNU Press. Pekanbaru. 2005.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. UI Press. Jakarta. 1995.
- Bernhard Limbong. *Hukum Agraria Nasional*. Margareth Pustaka. Jakarta Selatan. 2012.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta. 2005.
- Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2006.
- Djaren Seragih. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Tarsito. 1996.
- G. Kertasapoetra. et.al. *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. PT. Bina Aksara. Jakarta. 1985.
- H. Idris Djakfar. *Menguak Tabir Prasejarah Di Alam Kerinci*. Pemerintah Kabupaten Kerinci. Jambi. 2001.
- Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. 2008.
- Imam Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Azas*. Liberty. Yogyakarta. 1982.
- , *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty. Yogyakarta. 2007.
- Irene Eka Sihombing. *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Penerbit Universitas Trisakti. Jakarta. 2005.

- Irwansyah. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Cet. 4, Ed. Revisi. Mirra Buana Media. Yogyakarta. 2021.
- Is Joni. *Orang Sakai Dewasa Ini*. Unri Press. Pekanbaru. 2005.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*. Kompas. Jakarta. 2001.
- , *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Kompas. Jakarta. 2005
- Nico Ngani. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Pustaka Yudistira. Yogyakarta. 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. 2011.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu. Surabaya. 1987.
- R. Roestandi Ardiwilaga. *Hukum Agraria Indonesia*. NV. Masa Baru, Bandung. 1962.
- Romli Atmasasmita. *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R. Denpasar. 2003.
- , *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010.
- Rusmadi Murad. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Almuni. Bandung. 1991.
- Salim HS. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.
- Sarjita. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Tugu jogja Pustaka. Yogyakarta. 2005.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012.
- Soepomo. *Hukum Perdata Jawa Barat*. Djambatan. Jakarta. 1967.
- Soerjono Soekanto. *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*. Acadimica. Jakarta. 1979.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986.
- , *Penegakkan Hukum*. Binacipta. Bandung. 1999.
- Soerjono Wigjojodipuro. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. CV. Haji Masagung. Jakarta. 1992.
- Sri Susyanti Nur. *Bank Tanah*. As Publishing. Makassar. 2010.
- Ter Haar. *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*. Pradny Panata. Jakarta. 1999.

Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM. *Inkuiri Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta. 2016.

Urip Santoso. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta. 2005.

-----, *Perolehan Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta. 2015.

Utrecht dalam Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999.

UU. Hamidy. *Jagad Melayu Dalam Linrasan Budaya di Riau*. Bilik Kreatif Press. Pekanbaru. 2009.

Wayan Suhendra. *Hukum Pertanahan Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1994.

Jurnal

Fingli A. Wowo. *Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah*. Lex Privatum. Vol.II/No. 2. 2014.

Adonia Ivonne Laturette. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*. Jurnal Sasi Vol. 22 No. 2. 2016.

Disertasi dan Tesis

Bewa Ragawino. *Tesis, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Universitas Padjajaran. Bandung. 2008.

Syarifah, M. *Tesis, Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah dalam Era Otonomi Daerah Pada Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau*. Universitas Sumatera Utara. 2010.

Kalalo. J.J.J. *Disertasi Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Daerah Perbatasan*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2018.

Priscilla Maharani Asih Sukoco. *Tesis, Rancang Bangun Sistem Monitoring Pertumbuhan Tanaman Eucalyptus SP.Berbasis WEB Pada IUPHHK-HTI PT. Rimba Lazuardi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*. 2021.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkalis.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 tentang Pemekaran Beberapa Kabupaten di Provinsi Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian Adat Istiadat Melayu dan Pengembangan Kebiasaan-Kebiasaan, Masyarakat serta Lembaga Adat di Kabupaten Bengkalis.

Putusan

Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN. Bls.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/ PUU-V/2007.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Johan, selaku Ketua LAMR Kawasan Batin Lima dan Delapan Level Provinsi Riau, pada tanggal 11 Juni 2022.

Kuisisioner Datuk Seri H. Sofyan Said (selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR Kab. Bengkalis, dilakukan pada 16 Oktober 2022.

Internet

<https://tanahkita.id/data/konflik/detil/eERvZHZna0hZYVvk>, diakses pada 13 Oktober 2021.